

DETERMINASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN OPINI AUDIT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI DI SUMATERA SELATAN

Niken Ayuningrum¹, Dian Ofasari²
Program Studi Akuntansi, Politeknik Sekayu
Email: nikenayu.ningrum@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinasi kinerja pemerintah daerah dengan Opini Audit sebagai variabel pemoderasi dengan studi kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan). Kinerja Pemerintah Daerah diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD). Objek penelitian ini adalah kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Selatan sebanyak 14 kabupaten dan 3 kota. Data yang digunakan adalah data sekunder dan tahun penelitian 2016 sampai dengan 2020. Hasil penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Opini Audit sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa semakin tinggi skor opini audit maka pengaruh PAD dan Dana Transfer pada RKKD semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya pemeriksaan oleh BPK dalam bentuk opini audit dimaksudkan agar transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dapat terwujud. Selain itu, opini audit juga sebagai bentuk penilaian apakah pemerintah sudah bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, Kinerja Pemerintah Daerah dan Opini Audit.

Abstract

This study aims to determine the determination of local government performance with Audit Opinion as a moderating variable with a case study on the Regency / City Government in South Sumatra). Local Government performance is measured by the Regional Financial Independence Ratio (RKKD). The object of this research is the districts and cities in South Sumatra as many as 14 districts and 3 cities. The data used is secondary data and the research year is 2016 to 2020. The results of the study are that Regional Original Income and Transfer Funds simultaneously have a positive and significant effect on the Performance of Local Governments with Audit Opinion as a Moderating Variable. The results of this study mean that the higher the audit opinion score, the greater the influence of PAD and Transfer Funds on the RKKD. This is due to the existence of an audit by the BPK in the form of an audit opinion so that transparency and accountability of state finances can be realized. In addition, the audit opinion is also a form of assessment of whether the government has worked economically, effectively and efficiently.

Keywords: Local Revenue (PAD), Transfer Revenue, Local Government Performance and Audit Opinion.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah pusat dalam mendukung otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan. Tujuan dibentuknya otonomi daerah dimaksudkan agar ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat berkurang sehingga

kemandirian daerah dapat terwujud (Hasthoro dan Sunardi 2016). Jadi Otonomi daerah dapat memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya serta menggali potensi yang dimiliki daerah demi tercapainya pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kinerja daerah dan pelayanan publik.

Tercapainya pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat juga berasal dari tata cara pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien akan berdampak pada kinerja daerah yang salah satunya ditunjukkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber pembiayaan daerah bukan hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, namun juga berasal dari Pendapatan Transfer khususnya dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Mulya dan Bustamam 2016). Kebijakan dari pemerintah tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi

kesenjangan fiskal dan perbedaan kemampuan pada setiap daerah. Namun penggunaan DAU dianggap yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan sejumlah penggunaan Dana Perimbangan lainnya, dengan harapan penggunaan DAU tersebut dapat dikelola secara tepat sehingga dapat mendorong perkembangan perekonomian di daerah.

Pemerintah daerah di Sumatera Selatan juga berupaya untuk dapat meningkatkan kemandirian dalam mengelola keuangan daerah. Berikut data perkembangan PAD dan Pendapatan Transfer khususnya DAU di Sumatera Selatan dalam rupiah untuk Kabupaten dan Kota tahun 2016 sampai dengan 2020 pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Data PAD dan Dana Transfer
Tahun 2016 s.d 2020 (Dalam Milyar)

Tahun	PAD	Dana Transfer
2016	219.269,84	1.632.451,80
2017	311.159,39	1.845.901,01
2018	273.850,10	2.094.763,31
2019	315.118,10	2.409.297,63
2020	304.123,86	2.367.066,46

Sumber: BPK Perwakilan Sumatera Selatan 2021

Berdasarkan tabel 1 di atas untuk PAD dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi sedangkan Dana Transfer mengalami kenaikan setiap tahunnya. Secara umum pemerintah daerah di Sumatera Selatan masih tergantung dari dana perimbangan.

Kemudian muncul fenomena bahwa pada saat penerimaan bantuan transfer DAU besar, pemerintah daerah kemudian menginginkan agar penerimaan Dana Transfer pada periode berikutnya tetap besar atau malah dapat bertambah. Hal tersebut didukung oleh penelitian Ndadari dan Adi (2008) yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berperilaku asimetris dengan cara melakukan manipulasi data pada jumlah pengeluaran pemerintah menjadi setinggimungkin dan tidak berusaha meningkatkan PAD dengan maksud supaya dapat memperoleh bantuan berupa transfer dari pemerintah pusat. Padahal semestinya dengan adanya kebijakan bantuan transfer dana tersebut, pemerintah daerah dapat

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

mengalokasikan sumber dana yang diterima guna pengembangan pada sektor-sektor produktif sehingga dapat meningkatkan investasi daerah yang kemudian berdampak pada peningkatan penerimaan PAD.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan transparan dan akuntabilitas, dan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diberikan opini. Penelitian ini memasukan opini audit sebagai variabel pemoderasi untuk mengetahui pernyataan opini audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai tingkat kewajaran informasi dan perbandingan keuangan ataupun kinerja pemerintah pada setiap daerah. Lebih lanjut opini audit melalui pemeriksaan oleh BPK dimaksudkan agar transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dapat terwujud, dan untuk mengetahui upaya instansi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (Badan Pemeriksa Keuangan 2015).

tentang determinasi kinerja pemerintah daerah dengan Opini Audit sebagai variabel

pemoderasi dengan studi kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

2. TELAAH LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah dalam mengelola sumber kekayaan ataupun potensi yang dimiliki daerah, yang kemudian nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan, baik untuk belanja daerah ataupun untuk membiayai tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, besarnya jumlah PAD yang dihasilkan pemerintah daerah akan menentukan kinerja keuangan daerah.

Dana Transfer

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan (UU No. 33/2004).

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Transfer pengertian dana transfer adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah:

1. Sebagai tindakan nyata untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

2. Suatu upaya meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Dana Transfer terdiri dari: (1) Dana Bagi Hasil; (2) Dana Alokasi Umum; (3) Dana Alokasi Khusus.

Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Menurut Agoes (2013:3), auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Sementara untuk hasil dari pemeriksaan atau auditing yang dilakukan BPK itu sendiri adalah berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi yang dituangkan dalam Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

Hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah berupa pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dengan kata lain, opini BPK adalah pernyataan profesional atau pendapat BPK sebagai kesimpulan hasil dari pemeriksaan yang telah dilaksanakan mengenai tingkat kewajaran informasi (keuangan) yang disajikan dalam laporan keuangan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan (Rudianto: 2013:189). Selanjutnya measurement atau pengukuran kinerja diartikan

sebagai suatu indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntunan yang harus

Indikator untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja, dapat menggunakan beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kecerahan, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Pada penelitian ini indikator untuk mengukur kinerja keuangan daerah peneliti menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya

Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim 2007:1-5). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100 \%$$

Kemampuan keuangan terdiri dari: Rendah Sekali: 0% - 25%

Rendah : 25% - 50%

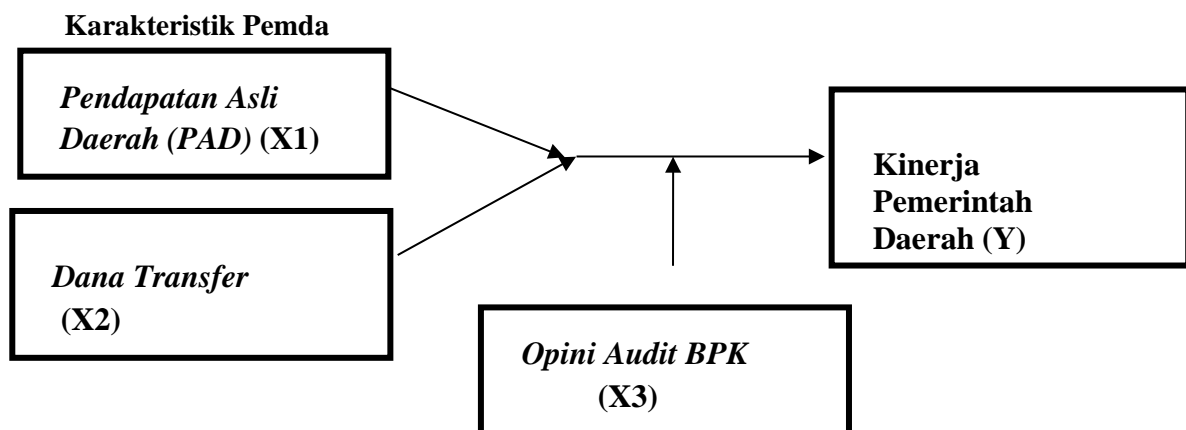
Sedang : 50% - 75%

Tinggi : 75% - 100%

Sumber: Abdul Halim (2007:169).

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya tentang determinasi kinerja pemerintah daerah dengan Opini Audit sebagai variabel pemoderasi dengan studi kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. sehingga kerangka penelitian ini dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: PAD berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H2: Dana Transfer berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H3: Opini BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H4: Interaksi PAD dan Opini BPK

berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H5: Interaksi Dana Transfer dan Opini BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

H6: PAD dan Dana Treansfer berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Opini Audit sebagai Variabel Moderasi

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi yang diambil adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yaitu sebanyak 14 kabupaten dan 3 kota. Untuk pemilihan sampel teknik yang dipilih dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh yaitu semua populasi dijadikan sampel.

Penelitian ini memakai jenis penelitian kuantitatif, dimana peneliti mengolah data sekunder sebagai sumber data yang dipakai dalam penelitian yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi atau data sekunder dan akan dianalisis dengan bantuan program SPSS. Penelitian ini menggunakan tahun penelitian selama 5 tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

Pengujian Data

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan yaitu:

1. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik meliputi:
 - 1) Uji Normalitas
 - 2) Uji Multikolinieritas
 - 3) Uji Autokoleransi.

2. Uji Regresi Berganda

Untuk melihat pengaruh faktor yang mempengaruhi kinerja kinerja pemerintah daerah dengan Opini Audit sebagai variabel pemoderasi, maka digunakan model Moderated Regression Analysis (MRA) dengan persamaan sebagai berikut:

Persamaan (1)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Persamaan (2) dengan pemoderasi.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_1.X_3 + b_5X_2X_3+e$$

Keterangan:

Y : Kinerja keuangan (Variabel Terikat)

X (1,2,3) : variabel bebas (independent)

X1 : Pendapatan Asli Daerah

X2 : Pendapatan Transfer

X3 : Opini Audit

A : nilai konstanta

B : nilai koefisien regresi

3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

4. Uji Hipotesis

Uji statistik t (parsial) yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel dependen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sampel Data

Jumlah sampel data kabupaten/kota yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 17 kabupaten/ kota di wilayah Sumatera Selatan data tahun 2016 sampai dengan 2020. Sampel yang diambil berdasarkan kelengkapan datanya dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah Kabuapten/ Kota Tahun 2020

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Kota	3
2.	Jumlah Kabupaten	14
	Jumlah	17

Sumber: Data diolah 2021

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dapat digunakan untuk memberikan kejelasan

mengenai karakteristik setiap variabel penelitian. Karakteristik tersebut dapat dijelaskan melalui tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Tabel Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	85	2	109	16,75	21,891
Transfer	85	5	330	121,76	72,803
Opini	85	3	4	3,96	,186
KRRD	85	3	366	27,97	54,373
PADxOPINI	85	9	437	66,83	87,657
TransferxOpini	85	18	1321	484,95	292,684
Valid N (listwise)	85				

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa:

- Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 3, nilai maksimum sebesar 366, mean sebesar 27,97 dan standar deviasi sebesar 54,373.
- Mean PAD sebesar 16,75 trilyun dengan nilai minimum sebesar 2 trilyun yaitu Kabupaten Empat Lawang tahun 2016, PAD maksimum sebesar 109 trilyun yaitu PAD Kota Palembang tahun 2017 dan standar deviasi sebesar 21,891 trilyun.
- Dana Transfer memiliki mean sebesar 121,76 trilyun dengan nilai minimum sebesar 5 yaitu Kota Pagaralam tahun 2016, nilai maksimum sebesar 330 trilyun yaitu Kota Musi Banyuasin tahun 2019 dan standar deviasi sebesar 72,803 trilyun.
- Opini Audit memiliki mean sebesar 3,96 dengan nilai minimum sebesar 3, nilai maksimum sebesar 4 dan standar deviasi

sebesar 0,186. Semakin tinggi skor yang di dapat maka tingkat kewajaran laporan keuangan semakin baik. Variabel moderasi PAD x Opini memiliki mean sebesar 66,83 dengan nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 437, dan standar deviasi sebesar 87,657. Variabel moderasi Dana Transfer x Audit memiliki mean sebesar 484,95 dengan nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum sebesar 1.321 dan standar deviasi sebesar 292,684.

Analisis Regresi Linier Berganda

Sebelum dilakukan analisis regresi berganda untuk pengujian hipotesis, serangkaian pengujian asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi maupun heteroskedastisitas) dilakukan terhadap data penelitian. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa data penelitian layak untuk diuji dengan pendekatan *multivariate* dengan

menggunakan regresi berganda. Pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda tampak dalam tabel 7 berikut ini:

(Persamaan1)

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$$

Tabel. 7
Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-12,196	89,345		-,137	,892
	PAD	1,591	,214	,641	7,419	,000
	Transfer	-,561	,065	-,751	-8,623	,000
	Opini	20,629	22,737	,070	,907	,367

a. Dependent Variable: KRRD

R² : 0,526

Adjusted R² : 0,508

Sign F : 0.000

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan angka RKKD atau dapat dikatakan variabel PAD, Dana Transfer, dan Opini Audit berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu RKKD.

Adjusted R² sebesar 0,508 yang mempunyai arti bahwa 50,8 % perubahan RKKD dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, Opini Audit.

:

Sedangkan sisanya 49,2 % dapat dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Persamaan regresi (1) yang dihasilkan adalah Sebagai berikut

$$Y = -12,196 + 1,591 \text{ PAD} - 0,561 \text{ Transfer} + 20,629 \text{ Opini} + e$$

Dan untuk Persamaan 2

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X1.X3 + b5X2X3 + e$$

Tabel. 8
Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,903	173,380		,149	,882
	PAD	1,588	,216	,639	7,352	,000
	Transfer	-1,201	2,491	-1,607	-,482	,631
	Opini	11,060	43,700	,038	,253	,801
	TransferxOpini	,160	,624	,863	,257	,798
	PADxOpini	,186	,065	,300	,2,869	0,005

a. Dependent Variable: RKKD

R² : 0,526
 Adjusted R² : 0,503
 Sign F : 0.000

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa p-value untuk variabel moderasi yaitu PAD x Opini sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif diterima. Tetapi Dana Transfer x Opini sebesar 0,798 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan angka RKKD atau dapat dikatakan bahwa variabel moderasi berpengaruh terhadap variabel Persamaan regresi (2) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 25,903 + 1.588 \text{ PAD} - 1,201 \text{ Transfer} +$$

Pembahasan
PAD berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil hipotesis pertama (H1) diperoleh hasil nilai tingkat signifikan uji t untuk variabel PAD sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 1,591. Hal ini dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada angka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga H1 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh suatu daerah maka angka RKKD yang dihasilkan akan semakin tinggi. Hal tersebut mempunyai arti apabila semakin tinggi PAD, maka kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan semakin baik dalam membiayai kebutuhan masyarakat daerah antara lain dalam hal pendidikan, kesehatan serta sektor-sektor pembangunan lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustiyangsih dan Immanuel (2014) yang membuktikan adanya pengaruh PAD terhadap kinerja pemerintah daerah di 275 kabupaten dan kota di Indonesia.

Dana Transfer berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil hipotesis kedua (H2) diperoleh nilai tingkat signifikansi uji t untuk variabel Dana Transfer sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar -0,105. Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Transfer berpengaruh negatif dan signifikan

dependen nya yaitu RKKD tetapi untuk variabel moderasi. Sedangkan, *Adjusted R²* sebesar 0,503 yang mempunyai arti bahwa 50.3 % perubahan RKKD dapat dijelaskan oleh variabel moderasi. Sedangkan sisanya 49,7 % dapat dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. *Adjusted R²* pada model persamaan kedua mengalami penurunan sebesar 0,005% apabila dibandingkan dengan *Adjusted R²* pada persamaan pertama.

$$11,060 \text{ Opini} + 0,186 \text{ (PADxOpini)} + 0,160 \text{ (TransferxOpini)} + e$$

pada angka RKKD, sehingga H2 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Transfer yang diterima dari pemerintah pusat kepada suatu daerah, maka angka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada daerah tersebut akan semakin menurun. Hal tersebut berarti bahwa dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tidak dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Adanya transfer dari pemerintah pusat, menyebabkan pemerintah daerah lebih bergantung pada dana transfer, sehingga kinerja pemerintah daerah semakin menurun, dengan dibuktikan dengan adanya dana transfer khususnya DAU yang semakin meningkat dari tahun 2016-2020 pada Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Selatan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lugastoro dan Ananda (2012) dan Budi (2017) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Penjelasan di dalamnya mengatakan bahwa adanya peningkatan transfer DAU tetapi menyebabkan penurunan RKKD, disebabkan oleh komponen alokasi dasar masih menjadi menjadi komponen utama yang mendominasi keseluruhan DAU yang diterima oleh daerah. Alokasi dasar yang dimaksud yaitu merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai daerah. Padahal semestinya dengan adanya kebijakan bantuan transfer dana tersebut, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber dana yang diterima guna pengembangan pada sektor-sektor produktif

Opini BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil hipotesis ketiga (H3) diperoleh nilai tingkat signifikan uji t untuk variabel Opini Audit sebesar 0,367 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien sebesar 20,629. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif tetapi tidak signifikan pada angka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga H3a diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi skor opini audit yang dimiliki oleh suatu daerah maka angka RKKD yang dihasilkan akan semakin tinggi. Sehingga opini audit dikatakan dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Semakin baik opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah tersebut akan semakin baik. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2015) dan (Masdiantini dan Erawati (2016) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Interaksi PAD dan Opini BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Hasil hipotesis keempat untuk variabel moderasi (H4) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi uji t untuk variabel pemoderasi opini audit mempengaruhi hubungan antara PAD dengan RKKD sebesar 0,005 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien sebesar 0,031, sehingga H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan sehingga dapat memoderasi hubungan PAD pada RKKD. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa semakin tinggi skor opini audit maka pengaruh PAD pada RKKD semakin meningkat. Keadaan ini menunjukkan bahwa dengan adanya opini audit dapat mendorong kinerja pemerintah daerah menjadi meningkat dengan diikuti peningkatan PAD yang kemudian di alokasikan ke sektor-sektor produktif RKKD, antara lain pendidikan, kesehatan, dan sektor pembangunan manusia lainnya. Hal ini dikarenakan adanya pemeriksaan oleh BPK dalam bentuk opini audit dimaksudkan agar transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dapat terwujud. Selain itu, opini audit juga sebagai bentuk penilaian apakah

pemerintah sudah bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien.

Interaksi Dana Transfer dan Opini BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil hipotesis kelima untuk variabel moderasi (H5) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi uji t untuk variabel pemoderasi opini audit mempengaruhi hubungan antara DAU dengan RKKD sebesar 0,798 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien sebesar - 0,160. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh tetapi tidak signifikan dan dapat memoderasi hubungan DAU pada RKKD dengan arah yang negatif, sehingga H5 diterima. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa penambahan 1 skor opini audit maka pengaruh Dana transfer pada RKKD semakin bertambah sebesar 0,160.

Keadaan ini menunjukkan bahwa dengan adanya opini audit mendorong pemerintah daerah lebih berupaya meningkatkan PAD sebagai pembiayaan kebutuhan daerahnya dan pengalokasian dana untuk sektor-sektor produktif dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia, didukung penggunaan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Sehingga dengan adanya opini audit, penggunaan dana transfer dapat dijadikan pertimbangan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah daerah untuk lebih dialokasikan ke sektor-sektor produktif.

PAD dan Dana Transfer berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Opini Audit sebagai Variabel Moderasi

Hasil hipotesis keenam untuk variabel PAD dan Dana Transfer berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Opini Audit sebagai Variabel Moderasi (H6) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi uji F untuk variabel pemoderasi opini audit mempengaruhi hubungan antara PAD dan Dana Transfer dengan RKKD sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. sehingga H6 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan sehingga dapat memoderasi hubungan PAD dan Dana Transfer pada RKKD. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa semakin tinggi skor opini audit maka pengaruh PAD dan Dana Transfer

pada RKKD semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya pemeriksaan oleh BPK dalam bentuk opini audit dimaksudkan agar transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dapat terwujud. Selain itu, opini audit juga sebagai bentuk penilaian apakah pemerintah sudah bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan dari analisis data dan pembahasan, maka simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Sumatera Selatan tahun 2016 - 2020.
2. Dana Transfer berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Sumatera Selatan tahun 2016 - 2020.
3. Opini Audit berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Sumatera Selatan tahun 2016 - 2020.
4. Interaksi Pendapatan Asli Daerah dan Opini Audit secara berpengaruh positif
5. dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota wilayah Sumatera Selatan tahun 2016 - 2020.
6. Interaksi Dana Transfer dan Opini Audit berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota wilayah Sumatera Selatan tahun 2016 - 2020.
7. PAD dan Dana Transfer secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Opini Audit sebagai Variabel Moderasi.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang digunakan hanya sampai tahun 5 dan variabel bebas yaitu PAD, dana transfer dan opini BPK, dan variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu opini BPK hanya dapat menerangkan sebagian kecil dari variabel terikat, sisanya dapat diterangkan oleh variabel lain diluar model.
2. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan variabel lain yang lebih relevan seperti sebagai pengukuran kinerja pemerintah daerah seperti rasio kemandirian keuangan daerah.
3. Variabel moderasi hasil audit yang digunakan di penelitian ini hanya menggunakan opini audit dikarenakan kelengkapan data hasil audit yang lain belum memadai, sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan hasil audit yang lainnya seperti temuan audit, dan kesimpulan audit.

Saran

Saran yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah daerah, yaitu

1. Pemerintah Daerah sebaiknya dapat memanfaatkan sumber sumber potensi dan sektor ekonomi daerah agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat sehingga daerah mampu lebih mandiri dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pembangunan daerahnya sendiri.
2. Sedangkan untuk penerimaan Dana Transfer sebaiknya dapat dimanfaatkan sebijak mungkin agar ketimpangan yang terjadi antar daerah dapat segera teratasi dan kegiatan pelayanan kepada publik dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Pemerintah daerah dalam wilayah Sumatera Selatan dapat menjaga dan mempertahankan Opini Audit atas Laporan Keuangan karena hampir seratus persen memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dri Asmawanti, dan Febriansyah. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota se-Sumatera Bagian Selatan." *Jurnal Akuntansi* Volume 3 No. 1 41-67.
- Angelina, Novita, dan Irsutami. 2014. "Hubungan Antara Opini Audit Atas Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kinerja keuangan daerah kabupaten/kota." *Jurnal ABEC* 1-6.
- Apriliawati, Kiki Ninda, dan Nur Handayani. 2016. "Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 5 No.2 1-16.
- Apriliawati, Kiki Ninda, dan Nur Handayani. 2016. "Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/kota di Jawa Timur." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 5 No.2 1-16.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Artha, Risma Diri, Prayitno Basuki, dan Alamsyah. 2015. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi NTB)." *Jurnal InFestasi* Volume 11, No.2 214-229.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 31 August 2015. www.bpk.go.id. Badan Pusat Statistik. 2015. Diakses 2016. www.bps.go.id. Badan Pusat Statistik. 8 July 2017. Diakses July 8, 2017. www.bps.go.id. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat
- Brodjonegoro, Bambang. 2001. "Indonesian Intergovernmental Transfer In Decentralization Era: The Case Of General Allocation Fund." An International Symposium on Intergovernmental Transfers in Asian Countries: Issues and Practices Asian Tax and Public Policy Program, Hitotsubashi University. Jakarta: Research Associate, The Institute Of Economic and Social Research, University Of Indonesia (LPEM-FEUI). 1- 35.
- Budi, Aris Setia. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2014."
- Budianto. 2012. *Pengaruh Opini, Temuan Audit, dan Gender Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008-2010*. Skripsi, Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Budianto, dan Stanly W Alexander. 2016. "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal EMBA* Volume 4, No.4 844-851.
- Calvin, Yesdi Christian, dan Lia Yuliana. 2016. "Deteksi Ilusi Fiskal pada Keuangan Daerah Kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur tahun 2008- 2013." *Jurnal Ilmiah WIDYA* 152- 159.
- Dengah, Stefandy, Vicky Rimate, dan Audie Niode. 2014. "Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Permintaan Perumahan Kota Manado Tahun 2003- 2012." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 14 No. 3 71-81.
- Ekawarna, Shita Unjaswati. 2017. "Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi)." *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol.4 No.3 167-184
- Brodjonegoro, Bambang. 2001. "Indonesian Intergovernmental Transfer In Decentralization Era: The Case Of General Allocation Fund." An International Symposium on

- Intergovernmental Transfers in Asian Countries: Issues and Practices Asian Tax and Public Policy Program, Hitotsubashi University. Jakarta: Research Associate, The Institute Of Economic and Social Research, University Of Indonesia (LPEM-FEUI). 1- 35.
- Budi, Aris Setia. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2014."
- Budianto. 2012. Pengaruh Opini, Temuan Audit, dan Gender Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008-2010. Skripsi, Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Budianto, dan Stanly W Alexander. 2016. "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara." Jurnal EMBA Volume 4, No.4 844-851. Calvin, Yesdi Christian, dan Lia Yuliana. 2016. "Deteksi Ilusi Fiskal pada Keuangan Daerah Kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur tahun 2008-2013." Jurnal Ilmiah WIDYA 152- 159.
- Dengah, Stefandy, Vicky Rimate, dan Audie Niode. 2014. "Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Permintaan Perumahan Kota Manado Tahun 2003-2012." Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 14 No. 3 71-81.
- Ekawarna, Shita Unjaswati. 2017. "Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi)." Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol.4 No.3 167-184
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBMSPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamara, Krisna Dwipayana. 2014. "Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus di Pemerintahan Kota Tasikmalaya)." Jurnal Universitas Siliwangi 1-12.
- Harahap, Riva Ubar. 2011. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Kab./kota Propinsi Sumatera Utara." Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Volume 11, No 1 47-58.
- Hartati, Yenni. 2011. "Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian." Jurnal Universitas Andalas 1-20. Hastoro, Handoko A, dan Sunardi. 2016. "Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia." Jurnal Ekonomika dan Bisnis Volume XIX, No 1 53-68.
- Jensen, Michael C, dan William H Meckling. 1976. "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." Journal of Financial Economics 3 305-360.
- Julitawati, Ebit, Darwanis, dan Jalaluddin. 2012. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Aceh." Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 1 No. 1 15-29.
- Khoiri, Rifki Hasan Al. 2015. "Flypaper Effect dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Barat." Signifikan Volume 4 No.2 211-230. Kuncoro, Haryo. 2007. "Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Atas Perubahan Besaran Transfer dari Pemerintah Pusat." The 1st Accounting Conference Faculty Of Economic Universitas Indonesia
- Sugiarthi, Ni Putu Dwi Eka Rini, dan Ni Luh Supadmi. 2014. "Pengaruh PAD, DAU, dan Silpa pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi." E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 477-495.
- Suhayati, Ely. 2011. "Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Audit Performance." Majalah Ilmiah Unikom Volume 6, No.2 204-212. Sukardi. 2010.

Evaluasi Pendidikan, Prinsip, dan Operasionalnya. Jakarta: PT. Bumi Aksara. S

ularso, Havid, dan Yanuar E Restianto. 2011. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah." *Media Riset Akuntansi* Volume 1 No. 2 109-124. S

umarjo, Hendro. 2010. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia." Skripsi Sarjana. Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Suryaningsih, Ni Made, dan Eka Ardhani Sisdyani. 2016. "Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Suryaningsih, Ni Made, dan Eka Ardhani Sisdyani. 2016. "Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit

Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Volume 15, No.2 1453-1481. Wandansari, Nini D. 2013. "Perlakuan Akuntansi Atas PPh Pasal 21 pada PT Artha Prima Finance Kotamobagu." *Jurnal EMBA* Volume 1 No. 3 558-566.

Wenny, Cherrya Dhia. 2011. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Ilmiah STIE MDP* Volume 2 No. 1 39-51